

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Untuk mengendalikan ketersediaan dan kesetabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dilaksanakan pemantauan dan pengawasan harga, mengelola stok dan logistic serta alur distribusi. Berdasarkan hasil dari monitoring ketersediaan bahan pokok penting di pasar rakyat rata-rata cenderung aman dan stabil sedangkan tingkat kunjungan berkurang sekitar 50 % yang biasa menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 H cukup banyak pengunjung, terjadi kenaikan dan penurunan harga pada beberapa kepokmas antara lain daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan sebesar 10% - 20% sedangkan sayur-sayuran yang mengalami kenaikan harga sekitar 10% - 25% dipengaruhi cuaca dan distribusi karena penyekatan di tiap daerah. Informasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) dikabupaten Sumedang selama bulan Juli 2021, hasil pemantauan di beberapa pasar (Sumedang Kota, Conggeang, Wado dan Tanjungsari) komoditas yang diperkirakan ada kenaikan adalah Daging sapi dari Rp. 130.000,- menjadi Rp 135.000, daging ayam dari Rp. 34.000,- menjadi Rp 35.000,-, telur ayam dari Rp. 22.000,- menjadi Rp. 23.000,-, ikan mas dari Rp. 28.000,- menjadi Rp. 30.000,-, ikan asin teri dari Rp. 80.000,- menjadi Rp. 100.000,-, cabe merah dari Rp. 40.000,- menjadi Rp. 50.000,-, bawang merah dari Rp. 32.000,- menjadi Rp. 36.000,-, sayuran mengalami kenaikan sekitar 15%, gula pasir local dari Rp. 13.000,- menjadi Rp. 13.500,-, minyak goreng tetap Rp. 15.000,- dan minyak goreng curah dari Rp. 14.500 menjadi Rp. 16.000,-. Sedangkan untuk harga kacang kedelai Impor dari Rp. 6.700,- menjadi Rp. 11.000,- dan kacang kedelai local tetap Rp. 13.000,- Untuk ketersediaan LPG 3 Kg ada 17 agen dan 700 pangkalan untuk ketersediaan wilayah Sumedang mencukupi, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) dari titik serah pangkalan Rp. 16.500,-, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan ada sebagian terjadi kenaikan harga pada warung-warung pengecer sampai dengan kisaran Rp 18.000,- sampai Rp. 25.000,-, sedangkan untuk alokasi kabupaten sumedang per tahun sebanyak 9.155.880 tabung dan alokasi regular bulan Juli 2021 sebanyak 854.640 tabung, ekstra drooping direncanakan bulan juli menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 H sebanyak dari total alokasi bulan Juli sebanyak 108.120 tabung

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

a. Fluktuasi harga di beberapa komoditi seperti daging sapi, daging ayam broiler dan berbagai jenis cabe terjadi kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. b. Pemantauan harga- harga dilaksanakan oleh SKPD terkait harus lebih ditingkatkan lagi. c. Monitoring dan evaluasi harus sering dilakukan secara rutin

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Pemantauan harga di pasar tradisional secara rutin b. Pemantauan harga ditingkat petani/peternak dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dinas Perikanan dan Peternakan c. Publikasi data harga pada aplikasi SILINDA DI JABAR (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi daerah di Jawa barat) d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi usaha kecil Menengah Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Bulog

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan

Ekonomi Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 d. Penyediaan harga dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Diperlukan koordinasi antar stakeholder yang lebih kuat terhadap upaya stabilisasi harga dan pemenuhan permintaan barang kebutuhan pokok masyarakat. b. Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait supaya dapat disinkronkan dengan hasil pemantauan harga kebutuhan pokok c. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berbelanja dengan bijak dan jangan terlalu berlebihan. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok masyarakat.